

Judul : Lindungi Nelayan Dari Pencuri Ikan
Tanggal : Minggu, 09 Maret 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

RUU Keamanan Laut

Lindungi Nelayan Dari Pencuri Ikan

KOMISI I DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut. RUU ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia serta mengatasi berbagai ancaman dari laut.

"RUU Keamanan Laut ini sangat penting dibahas. Laut kita perlu diamankan. Karena ternyata, ketika pengamanan laut belum kita optimalkan dengan baik, dampak negatifnya sangat panjang, sangat besar,"

kata Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Herawan dalam keterangan persnya, Jumat (7/3/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, illegal fishing atau praktik pencurian ikan juga menjadi perhatian khusus dalam pembahasan RUU Keamanan Laut.

Begitu juga dengan praktik penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab dengan alat tangkap berbahaya, seperti pukat harimau. Praktik tersebut menyebabkan kerusakan eko-

sistem laut dan berkurangnya sumber protein bagi masyarakat Indonesia.

"Bagaimana memantau kapal-kapal besar yang melakukan kejahatan. Kejahatannya adalah mengambil semua jenis ikan, dari kecil sampai besar. Kalau jaringnya itu yang benar, hanya ikan-ikan besar terjaring. Tetapi kalau jaringnya memiliki lubang-lubang kecil, seperti pukat harimau yang sering disebut, maka semua ikan akan terambil," sebutnya.

Tidak hanya itu, ikan-ikan

yang kecil tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang dan masyarakat berpotensi kehilangan sumber protein.

"Itu dampaknya akan besar bagi masa depan masyarakat kita, khususnya generasi muda. Karena itulah, illegal fishing ini menjadi perhatian besar dalam rangka pengamanan laut kita," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia bilang, keamanan laut bukan hanya menyangkut ke-

daulatan wilayah, juga berkaitan dengan kedaulatan Sumber Daya Manusia (SDM). Tanpa pengamanan yang baik, Indonesia bisa mengalami ancaman serius dari berbagai sisi, termasuk dari aspek pertahanan dan ekonomi.

"Karena itulah, perlu ada sistem pengamanan laut kita dalam regulasi Undang-Undang (UU) yang sangat kuat untuk menjaga kedaulatan kita. Agar daratan tersebut bukan hanya berarti bahwa kedaulatan tersebut, Indonesia terjaga. Bukan dijahaj lagi," tandasnya. ■ OHP